

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi persaingan pasar bebas begitu terbuka, hal ini menyebabkan persaingan bisnis yang kuat antar produk UMKM di pasar nasional dan internasional. Pada kondisi ini UMKM dihadapkan dengan perdagangan bebas dan segmen pasar yang sama. Untuk dapat menghadapi kondisi seperti sekarang ini maka para pelaku UMKM dituntut untuk meningkatkan mutu produk atau jasa yang dihasilkan dan tingkat kinerja karyawan yang lebih baik, sehingga mampu menghasilkan produk yang sesuai standar kualitas yang diminati konsumen (Aziz dan Morita, 2016).

Kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang berkualitas baik merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Bagi konsumen mutu adalah cara kerja produk sesuai dengan tujuan pembuatannya. Pengendalian mutu adalah penciptaan standar kualitas dan pengukuran kesesuaian barang jadi atau jasa dengan standar tertentu. Pengawasan mutu suatu produk semata hanya pemeriksaan produk sebelum dipasarkan (Machfoedz dan Mahmud, 2007).

Secara realita pelaku UMKM pada tahun 2019 sudah dipastikan akan menghadapi pesta demokrasi politik dan persaingan ekonomi global. Adapun kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang bagi UMKM dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan usaha ekonominya, sehingga mampu berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri berbasis teknologi dan kearifan lokal sebagai perwujudan wajah UMKM pada tahun 2019.

Menurut Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Selanjutnya ditulis UMKM), yang dimaksud dengan Usaha Mikro Kecil dan Mengengah (UMKM) adalah usaha

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Saat ini di Indonesia jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai sekitar 57 juta pada tahun 2017. Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, kontribusi pada sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat 57,84% menjadi 60,34% dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Dapat disimpulkan dari data diatas bahwa UMKM berhasil berdampak langsung dalam perkembangan pembangunan perekonomian di negara berkembang seperti Indonesia.

UMKM mampu menjadi stabilisator dan dinamisator perekonomian Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat penting memperhatikan UMKM, disebabkan UMKM mempunyai kinerja lebih baik dalam tenaga kerja yang produktif, meningkatkan produktivitas tinggi, dan mampu hidup ditengah-tengah usaha besar. UMKM mampu menopang usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suku cadang dan bahan pendukung lainnya. UMKM juga mampu menjadi ujung tombak bagi usaha besar dalam menyalurkan dan menjual produk dari usaha besar ke konsumen. Kedudukan UMKM ini semakin penting, selain mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak, UMKM ini bersifat lincah sehingga mampu bertahan di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, seperti terjadinya krisis global saat ini.

UMKM merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Keberadaan UMKM tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan perekonomian secara nasional. UMKM selalu menjadi sasaran program pengembangan dari berbagai institusi pemerintah, namun program pengembangan tersebut belum menunjukkan terwujudnya pemberdayaan

terhadap kelompok tersebut. Sehubungan dengan hal ini, para pelaku usaha dihadapkan pada berbagai masalah seperti keterbatasan sumber daya manusia, keuangan dan peralatan kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha mereka.

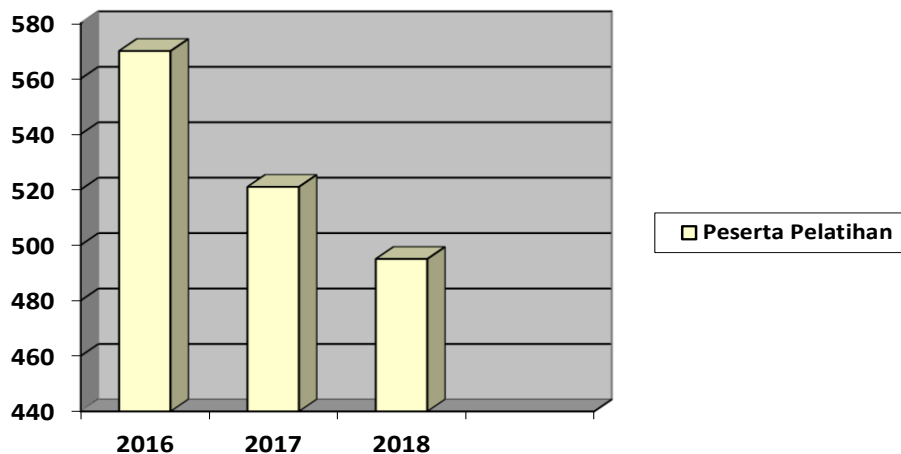
Keberadaan UMKM pada dasarnya merupakan sektor usaha yang membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sebab dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru tersebut pula tentunya akan berdampak positif untuk mengurangi tingginya angka pengangguran. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pembinaan kepada sektor usaha kecil di daerahnya masing-masing dalam rangka memberdayakan masyarakat.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Perkembangan dan Pertumbuhan UMKM di Indonesia sebenarnya cukup bagus dari tahun ke tahun. Hampir dari setiap pemerintahan selalu membuat program-program untuk pemberdayaan UMKM. Seperti diprovinsi Lampung, pemerintah secara serius memberikan perhatian lebih pada sektor UMKM. Data dari Dinas Koperasi dan UMKM menjelaskan bahwa pemerintah banyak membuat program bagi UMKM untuk pengembangan, seperti melakukan pelatihan yang bertujuan meningkatkan SDM, kualitas, produktivitas dan kinerja bagi UMKM disetiap tahunnya, tetapi dari data yang ada UMKM

yang mau mengikuti pelatihan dari tahun 2016 – 2018 mengalami penurunan. Berikut ini merupakan data peserta pelatihan UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM di wilayah provinsi Lampung.

Grafik 1.1 Data Peserta Pelatihan UMKM 2016-2018



Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung 2018

Grafik 1.1 menjelaskan tentang peserta UMKM yang mengikuti pelatihan, tetapi dapat dilihat dari tahun ketahun peserta yang mengikuti pelatihan mengalami penurunan. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM kota Bandar Lampung penurunan peserta pelatihan ini terjadi karena kurangnya kesadaran UMKM untuk mengikuti pelatihan yang bertujuan meningkatkan kompetensi bagi pegelolanya dan menjadi suatu penilaian bahwa tingkat produktivitas kerja UMKM mengalami penurunan setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Data UMKM di Provinsi Lampung Desember 2017

NO	Kabupaten/Kota	Mikro	Sektor Usaha Kecil	Menengah	Jumlah
1	Lampung Barat	5.065	159	4	5.228
2	Lampung Selatan	7.943	467	152	8.562
3	Lampung Tengah	1.155	0	0	1.155
4	Lampung Timur	34.492	6.080	122	40.694
5	Lampung Utara	34.492	6.080	122	40.694
6	Mesuji	3.029	151	5	3.185
7	Pesawaran	1.097	214	58	1.369
8	Pesisir Barat	782	29	3	814
9	Pringsewu	3.706	770	42	4.518
10	Tanggamus	5.773	0	0	5.773
11	Tulang Bawang	13.804	239	2	14.045
12	Tulang Bawang Barat	1.373	2	0	1.375
13	Way Kanan	5.575	70	4	5.649
14	Bandar Lampung	1.933	152	40	2.125
15	Metro	6.426	907	85	7.418
	JUMLAH	101.051	11.356	547	157.922

Sumber: REKORNAS Lampung 2018

Pada Tabel 1.1 menjelaskan tentang jumlah UMKM Provinsi Lampung. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa begitu banyak jumlah UMKM di Provinsi Lampung, dengan total mencapai 157.922 UMKM yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Lampung. Dengan banyaknya UMKM yang ada seharusnya bisa meningkatkan pendapatan daerah, tetapi pada kenyataannya dalam proses pelaksanaannya masih banyak sekali kendala-kendala yang membuat UMKM ini kurang berkembang, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keuangan dan peralatan kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha mereka.

Gugus kendali mutu telah banyak diterapkan baik oleh perusahaan besar ataupun para pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu alat untuk upaya dalam peningkatan mutu serta daya saing dan profitabilitas jangka panjang dengan melakukan perbaikan penerapan gugus kendali mutu secara terus menerus (Ong, 2015).

Gugus kendali mutu merupakan inti organisasi dalam memecahkan persoalan-persoalan mutu dan merupakan suatu kelompok kecil dalam tempat kerja yang sama, yang secara sukarela bertemu untuk membicarakan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kualitas, mencari penyebabnya, memberikan usul pemecahan masalah, dan mengambil tindakan perbaikan (Ishikawa, 1992). Menurut Crocker, dkk (2007) Gugus kendali mutu memiliki tiga tujuan utama. Pertama, berkontribusi dalam peningkatan dan pengembangan perusahaan. Kedua, untuk menghormati martabat manusia dalam upaya mereka untuk mengembangkan diri dan menciptakan tempat kerja yang bermakna bagi mereka. Ketiga, untuk menggambarkan adanya kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih baik dalam upaya pemecahan masalah kualitas.

Pada penelitian sebelumnya membahas tentang “Pengembangan instrumen dalam penerapan Gugus Kendali Mutu dan Produktivitas Kerja pada UMKM” (Aziz, dkk; 2018). Penelitian ini memiliki 13 instrumen untuk mengukur tingkat valid dan reliabel dalam menerapkan Gugus Kendali Mutu dan Produktivitas Kerja pada UMKM yang sering ditemukan dan dihadapi oleh pelaku UMKM barang maupun jasa. Hasil dari penelitian ini memaparkan pembuktian bahwa 13 instrumen yang Valid dan Reliabel dalam penerapan Gugus Kendali Mutu dan Produktivitas Kerja pada UMKM. Dari hasil tersebut penulis ingin melanjutkan penelitian menggunakan 13 instrumen sebelumnya dengan menambahkan variabel lain, bahwa dalam penelitian ini menginvestigasikan interaksi/hubungan antara Penerapan Gugus Kendali Mutu, Budaya Organisasi dan Kinerja Organisasi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Lampung.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai hal tersebut dan menyajikannya dalam laporan tesis dengan judul : **“Analisis Pengaruh antara Gugus Kendali Mutu, Budaya Organisasi, Produktivitas Kerja dan Kinerja Organisasi (Studi kasus pada UMKM di Lampung)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Budaya Organisasi terhadap Gugus Kendali Mutu pada UMKM di Lampung?
2. Bagaimana pengaruh Gugus Kendali Mutu terhadap Produktivitas Kerja pada UMKM di Lampung?
3. Bagaimana pengaruh Gugus Kendali Mutu terhadap Kinerja Organisasi pada UMKM di Lampung?
4. Bagaimana pengaruh Produktivitas Kerja terhadap Kinerja Organisasi pada UMKM di Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh Budaya Organisasi terhadap Gugus Kendali Mutu pada UMKM di Lampung.
2. Untuk menganalisis pengaruh Gugus Kendali Mutu terhadap Produktivitas Kerja pada UMKM di Lampung.
3. Untuk menganalisis pengaruh Gugus Kendali Mutu terhadap Kinerja Organisasi pada UMKM di Lampung.
4. Untuk menganalisis pengaruh Produktivitas Kerja terhadap Kinerja Organisasi pada UMKM di Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini ditujukan kepada penulis, praktisi dan pembaca.

1. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan wawasan peneliti dalam bidang manajemen SDM khususnya tentang

Gugus Kendali Mutu, Budaya Organisasi, Produktivitas Kerja dan Kinerja Organisasi.

2. Praktisi

Sebagai saran dan tambahan informasi untuk UMKM dan masyarakat di Provinsi Lampung dan bisa menjadi rujukan untuk meningkatkan kualitas atau mutu UMKM di Provinsi Lampung.

3. Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperkaya keilmuan setiap pembaca dalam mempelajari Gugus Kendali Mutu, Budaya Organisasi, Produktivitas Kerja dan Kinerja Organisasi pada UMKM. Penelitian ini juga bisa dijadikan referensi oleh peneliti lain dengan masalah yang sama atau objek untuk meningkatkan mutu penelitian di masa depan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tentang “Analisis Pengaruh antara Gugus Kendali Mutu, Budaya Organisasi, Produktivitas Kerja dan Kinerja Organisasi (Studi kasus pada UMKM di Lampung)”.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan mengenai Gugus Kendali Mutu, Budaya Organisasi dan Kinerja Organisasi, serta hipotesis.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisikan tentang jenis dari penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hasil dan pembahasan mengenai “Analisis Pengaruh antara Gugus Kendali Mutu, Budaya Organisasi, Produktivitas Kerja dan Kinerja Organisasi (Studi kasus pada UMKM di Lampung)”.

Bab V : Simpulan dan Saran

Berisi simpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca pada umumnya.